BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Pengimplementasian penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Bawaslu Muaro Jambi melakukan sosialisasi kepada partai politik dan caleg dalam bentuk rapat koordinasi tentang tata tertib pemasangan dan waktu pemasangan APK. selain itu Bawaslu Muaro Jambi juga berkoordinasi langsung dengan lembaga dan dinas terkait serta pihak keamanan dari TNI dan POLRI.
2. Bawaslu Muaro Jambi juga melakukan pelatihan kepada anggota Bawaslu, Panwascam dan kelompok yang dibentuk yaitu kelompok kerja (Pokja). Dengan tujuan mengawasi dan menertibkan APK yang melanggar dan penertiban APK pasca masa tenang. Selain itu Bawaslu mempersiapkan sarana dan prasarana dengan menyiapkan kendaraan operasional dan alat angkut (crane, mobil dinas).
3. Pada proses pengawasan penertiban APK sebelumnya Bawaslu Muaro Jambi menghimbau terlebih dahulu kepada peserta pemilu untuk menertibkan APK-nya secara mandiri dengan diberi waktu tertentu. Dan jika peserta pemilu tidak melakukan penindakan, Bawaslu langsung bergerak untuk melakukan penertiban dengan dibantu oleh instansi dan

lembaga terkait, serta di bantu oleh pihak pengamanan dari TNI dan POLRI. Lokasi penertiban APK di lakukan di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

4. Bawaslu memiliki prosedur dalam penertiban APK. dengan didasari oleh regulasi Peraturan Bawaslu No. 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif, Peraturan Bawaslu No. 11/2023 tentang Pengawasan Kampanye, dan PKPU No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu, serta melibatkan koordinasi lintas instansi seperti Satpol PP, TNI/Polri, dan Dinas terkait. Dengan begitu Bawaslu mempunyai dan wewenang dalam mengawasi dan menertibkan APK yang melanggar dan tidak sesuai aturan.

Pada pengimplementasian penertiban APK telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur, namun dalam hal ini Bawaslu Muaro Jambi mempunyai kendala dalam penertiban APK di antaranya,

1. Kurangnya perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang fasilitas umum sehingga peserta pemilu memasang APK di fasilitas umum.
2. Kurang patuhnya peserta pemilu terhadap tata tertib APK sehingga menjadi faktor krusial bagi bawaslu Muaro Jambi.
3. Luas wilayah Kabupaten sehingga Bawaslu kesulitan dalam penertiban APK, selain itu juga waktu penertiban yang terlalu sempit, dan kurangnya teknologi modern untuk penertiban APK yang susah dijangkau dan kurangnya transportasi pengangkut APK sehingga Bawaslu terhambat dalam penertiban APK.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang **“Implementasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muaro Jambi Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024”** yaitu :

1. Perlunya kesadaran dari peserta pemilu (Caleg dan Parpol) untuk menaati regulasi tentang APK. Demokrasi akan berjalan dengan baik jika peserta pemilunya menaati aturan yang ada.
2. Perlunya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Pemilu. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi membuat peraturan tentang fasilitas umum, supaya nantinya peserta pemilu tidak memasang APK-nya di sembarang tempat termasuk fasilitas umum.
3. Bawaslu yang merupakan lembaga pengawas yang terpercaya harus tegas, dengan memberikan sanksi yang berat untuk peserta pemilu yang tidak menaati peraturan terutama mengenai APK.
4. Bawaslu perlu sosialisasi ke masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan mengawasi dan melaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilu (APK).